



KEMENTERIAN SEKRETARIAT NEGARA RI  
SEKRETARIAT WAKIL PRESIDEN

# **PERAN PEMERINTAH DAERAH (TKPK) Dalam Mensukseskan Pelaksanaan Program PNPM**

**Lokakarya Nasional TKPK – MEI 2014**

**Kelompok Kerja Kebijakan Program Nasional Pemberdayaan Nasional (PNPM)**

Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan

Sekretariat Wakil Presiden Republik Indonesia

**Jakarta 13-14 Mei 2014**

# Konsep PNPM

# KONSEP PEMBERDAYAAN MASYARAKAT

PNPM adalah kebijakan nasional mengenai upaya bersama Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah untuk penanggulangan kemiskinan melalui pendekatan pemberdayaan masyarakat dengan tujuan untuk menyediakan aset dan meningkatkan pelayanan bagi masyarakat terutama kelompok perempuan dan miskin, membuka lapangan kerja, dan memperbaiki tata kelola.

- Proses partisipatif dengan fasilitasi pemberdayaan penduduk miskin / marjinal
- Alokasi dana langsung kepada kelompok masyarakat berbasis manajemen lokal
- Sistem yang transparan, terbuka, dengan pembinaan dan pengawasan/audit oleh masyarakat

**MODAL SOSIAL**  
(kohesi, *trust* , gotong royong,)

**KELOMPOK SOSIAL**  
(BKAD, UPK, BKM/LPM, BumDes)

**AKSES**  
(Layanan dasar, informasi, keuangan)

**MASYARAKAT BERDAYA**



**MANDIRI,  
MAJU,  
DAN SEJAHTERA**

# PROSES PEMBERDAYAAN MASYARAKAT (*COMMUNITY BASED DEVELOPMENT*)

## Pemetaan Sosial/Swadaya:

- Merumuskan kebutuhan dan potensi yang ada.
- Memecahkan persoalan dengan potensi yg dimiliki

## Mengenali kemiskinan:

- Identifikasi kemiskinan
- Merumuskan persoalan kemiskinan yang dihadapi
- Merumuskan penyebabnya

## Sosialisasi Awal dan Musyawarah Masyarakat:

- Pemetaan sosial
- Sosialisasi program

## Pengorganisasian Masyarakat:

Lembaga Keswadayaan Masyarakat dibentuk/ditetapkan, dimiliki, dan dikelola untuk memenuhi kebutuhan bersama

## Penyusunan Rencana:

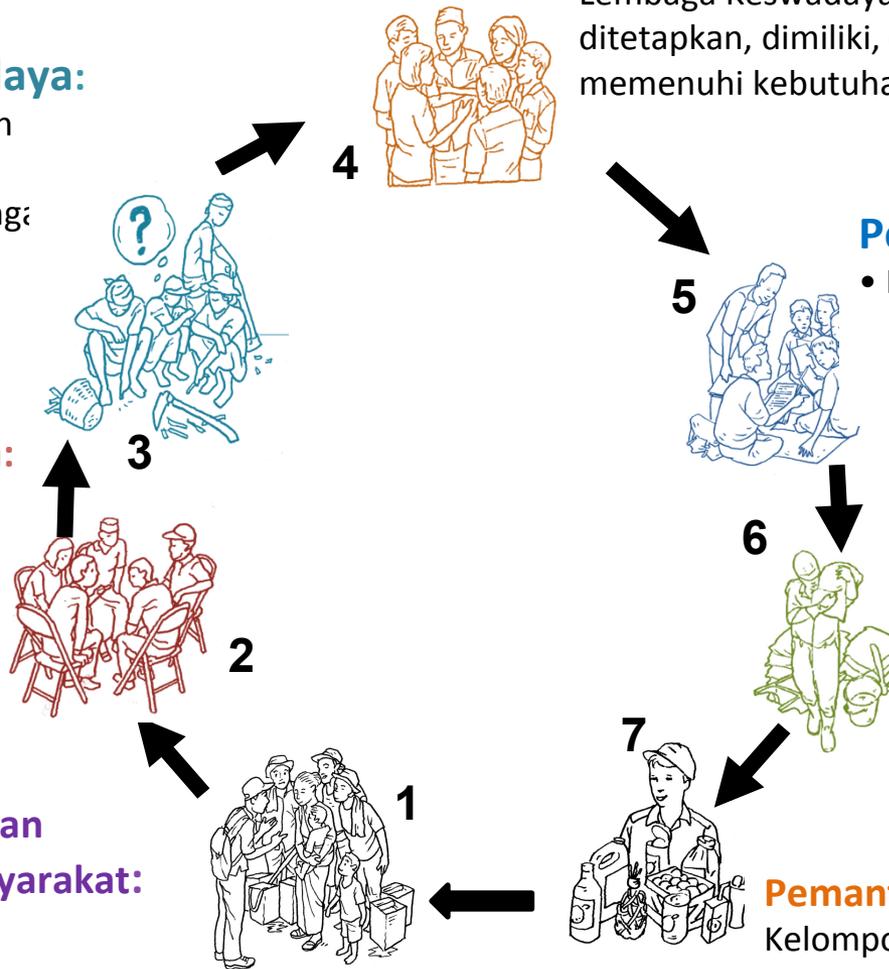
- Identifikasi dan Prioritisasi
- Penyusunan Rencana/Program Penanggulangan kemiskinan

## Pelaksanaan Kegiatan:

- Pembentukan/Penetapan kelompok swadaya masyarakat pelaksana kegiatan
- Media bersama untuk menyelesaikan masalah secara mandiri

## Pemanfaatan dan Pemeliharaan:

Kelompok swadaya masyarakat dan masyarakat miskin lainnya



# TUJUAN dan SASARAN PROGRAM PNPM

## Peningkatan Pelayanan Publik

- Peningkatan akses dan perbaikan Infrastruktur
- Perbaikan Pelayanan Dasar Masyarakat

1. Infrastruktur Dasar (Jalan, Jembatan, Irigrasi, dll)
2. Sektor pendidikan, kesehatan, santuan sosial
3. Perbaikan Hunian, penataan lingkungan permukiman

## Peningkatan Pendapatan Masyarakat

- Penciptaan Lapangan Kerja
- Pemberian Modal Usaha skala kecil
- Penyerapan Tenaga Kerja (HOK)

1. Kelompok Simpan pinjam
2. SPP (Simpan Pinjam untuk Perempuan)
3. HOK (Hari orang Kerja)
4. Kegiatan Usaha baru

## Penguatan Modal Sosial

- Membangun tatakelola yang baik (good governance)
- Membangun mekanisme Musyawarah/ Rembug Warga
- Pelatihan Penguatan Kapasitas

1. Penerapan Prinsip Transparansi, akuntabilitas, demokrasi, dan
2. Pelatihan Perencanaan Partisipatif, Kewirausahaan dan Pengelolaan Pengaduan

# Konsepsi Pembangunan Desa Dalam Pelaksanaan PNPM

- Perencanaan pembangunan berbasis pada permasalahan dan kebutuhan bersama
- Mengutamakan potensi dan sumber daya setempat
- Menggunakan perencanaan partisipatif
- Disepakati secara musyawarah melalui mekanisme pertemuan dan rembuk-rembug masyarakat
- Melakukan pertanggung jawaban publik

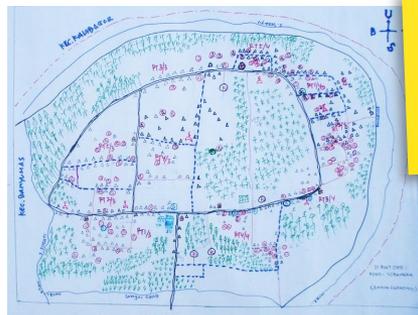
# SISTIM PNPM dalam PERENCANAAN PEMBANGUNAN DESA

# Pemetaan Sosial (social mapping)

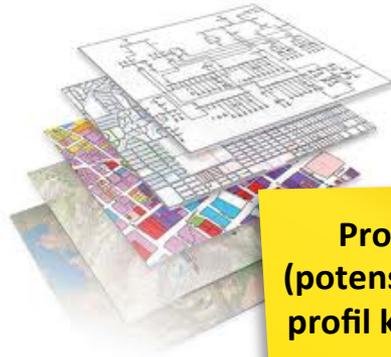
**Proses Awal Perencanaan Pembangunan Desa**, yang dilaksanakan secara partisipatif oleh masyarakat untuk menemu kenali dinamika sosial, permasalahan (utama) dan potensi sumber-sumber daya bersama, sebagai dasar perencanaan masyarakat untuk merumuskan kebutuhan sendiri (perencanaan partisipatif) dalam menyelesaikan berbagai persoalan bersama khususnya dalam rangka penanggulangan kemiskinan



Pemetaan Sosial



Peta Desa



Profil Desa  
(potensi, masalah,  
profil kemiskinan)

Refleksi/Analisis  
Kemiskinan



- Faktor penyebab kemiskinan
- Kriteria lokal kemiskinan
- Solusi penyelesaian
- Skala Prioritas penyelesaian

# Instrumen Pemetaan Sosial (*social mapping*)

**LAMPIRAN 3. INSTRUMEN SENSUS PROFIL KK MISKIN**

Nama		Nama		Nama	
Umur	Tahun	Umur	Tahun	Umur	Tahun
Jenis kelamin		Jenis kelamin		Jenis kelamin	
Jml Tanggungan		Status		Status	
Posisi dlm kel	Kepala Keluarga	Posisi dlm kel	Anggota keluarga (istri)	Posisi dlm kel	Anggota keluarga
Alamat					
<b>A. Pertanyaan seputar masalah Kesehatan</b>					
<b>Kesehatan Ibu Hamil</b>					
1. Melakukan imunisasi lengkap (TT-1, TT-2)	<input type="checkbox"/> Lengkap	<input type="checkbox"/> Tidak lengkap	<input type="checkbox"/> Tdk imunisasi	<input type="checkbox"/> Ya	<input type="checkbox"/> Tidak
2. Melakukan pemeliharaan rutin kehamilan	<input type="checkbox"/> 2 bulan sekali	<input type="checkbox"/> 1 bulan sekali	<input type="checkbox"/> tidak pernah	<input type="checkbox"/> 2 bulan sekali	<input type="checkbox"/> 1 bulan sekali
3. Tempel Pemeriksaan konsultasi rutin	<input type="checkbox"/> Dokter	<input type="checkbox"/> Bidan	<input type="checkbox"/> Dukun beranak	<input type="checkbox"/> Dokter	<input type="checkbox"/> Bidan
4. Perbandingan berat badan dan usia keham	<input type="checkbox"/> > BB daripada usia kehamilan	<input type="checkbox"/> seimbang	<input type="checkbox"/> < BB daripada usia kehamilan	<input type="checkbox"/> > BB daripada usia kehamilan	<input type="checkbox"/> seimbang
<b>Kesehatan Reproduksi</b>					
1. Tempel persalinan Ibu melahirkan	<input type="checkbox"/> Dokter	<input type="checkbox"/> Bidan	<input type="checkbox"/> Dukun beranak	<input type="checkbox"/> Dokter	<input type="checkbox"/> Bidan
2. Pernah menderita kanker melanin anak sebelumnya	<input type="checkbox"/> tidak pernah	<input type="checkbox"/> pernah	<input type="checkbox"/> tidak pernah	<input type="checkbox"/> pernah	<input type="checkbox"/> tidak pernah
3. pernah mempunyai penyakit infeksi	<input type="checkbox"/> tidak pernah	<input type="checkbox"/> pernah	<input type="checkbox"/> tidak pernah	<input type="checkbox"/> pernah	<input type="checkbox"/> tidak pernah
4. Mempunyai kelurgan Zai besi (anemia)	<input type="checkbox"/> tidak	<input type="checkbox"/> ya	<input type="checkbox"/> tidak	<input type="checkbox"/> ya	<input type="checkbox"/> tidak
5. Penyakit menular yang diderita	<input type="checkbox"/> TBC	<input type="checkbox"/> Hepatitis	<input type="checkbox"/> Demam	<input type="checkbox"/> TBC	<input type="checkbox"/> Hepatitis
	<input type="checkbox"/> Malaria	<input type="checkbox"/> Tetanusa	<input type="checkbox"/> Malaria	<input type="checkbox"/> Malaria	<input type="checkbox"/> Malaria
2. Malaria	<input type="checkbox"/> Tidak	<input type="checkbox"/> Tidak	<input type="checkbox"/> Tidak	<input type="checkbox"/> Tidak	<input type="checkbox"/> Tidak
3. Pergerakan air minum	<input type="checkbox"/> PAM	<input type="checkbox"/> Air Sumur	<input type="checkbox"/> Air Sungai	<input type="checkbox"/> PAM	<input type="checkbox"/> Air Sumur
4. Buang air Besar	<input type="checkbox"/> WC Pribadi	<input type="checkbox"/> WC Umum	<input type="checkbox"/> Sungai/Aliran	<input type="checkbox"/> WC Pribadi	<input type="checkbox"/> WC Umum
5. Pembuangan sampah	<input type="checkbox"/> tempat sampah	<input type="checkbox"/> Dibakar	<input type="checkbox"/> dibuang ke	<input type="checkbox"/> tempat sampah	<input type="checkbox"/> Dibakar
6. Jajangan Listrik	<input type="checkbox"/> Milik sendiri	<input type="checkbox"/> Numpang	<input type="checkbox"/> Tidak ada	<input type="checkbox"/> Milik sendiri	<input type="checkbox"/> Numpang
<b>B. Pertanyaan seputar Pendidikan</b>					
1. Tingkat Pendidikan	<input type="checkbox"/> Idk sekolah	<input type="checkbox"/> Tamal SD	<input type="checkbox"/> Tamal SLTP	<input type="checkbox"/> Idk sekolah	<input type="checkbox"/> Tamal SD
	<input type="checkbox"/> Tamal SLTA	<input type="checkbox"/> Perguruan Tinggi	<input type="checkbox"/> Kursus	<input type="checkbox"/> Tamal SLTA	<input type="checkbox"/> Perguruan Tinggi
	<input type="checkbox"/> Butehump	<input type="checkbox"/> Butehump	<input type="checkbox"/> Butehump	<input type="checkbox"/> Butehump	<input type="checkbox"/> Butehump
<b>C. Pertanyaan seputar masalah</b>					
1. Pekerjaan	<input type="checkbox"/> Belanja	<input type="checkbox"/> pengangguran	<input type="checkbox"/> Belanja	<input type="checkbox"/> pengangguran	<input type="checkbox"/> Iduk produktif
2. Jenis pekerjaan	<input type="checkbox"/> serabutan	<input type="checkbox"/> serabutan	<input type="checkbox"/> PNS	<input type="checkbox"/> serabutan	<input type="checkbox"/> PNS
3. Pekerjaan tetap	<input type="checkbox"/> PNS	<input type="checkbox"/> jasa	<input type="checkbox"/> perdagangan	<input type="checkbox"/> PNS	<input type="checkbox"/> jasa
4. Serabutan (*)	<input type="checkbox"/> pertanian	<input type="checkbox"/> jasa	<input type="checkbox"/> perdagangan	<input type="checkbox"/> pertanian	<input type="checkbox"/> jasa

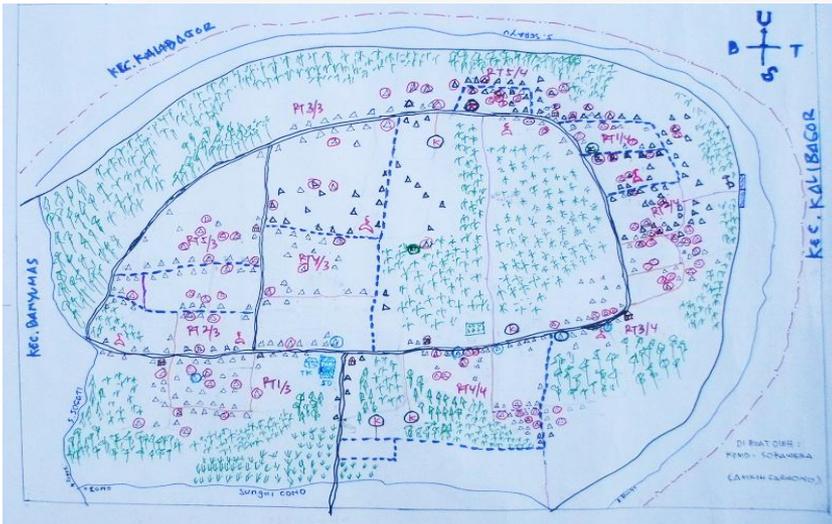
← Wawancara Terstruktur

Pendataan KK dan Penduduk Miskin

DAFTAR WARGA MISKIN HASIL PEMETAAN SWADAYA (PS-2)  
DESA SINDANGLAYA, KECAMATAN CIPANAS, KABUPATEN CIANJUR, JAWA BARAT  
TAHUN 2011

NO	PS-2	KK	NAMA KK	JENIS KELAMIN		USIA	ALAMAT		TANGGUNGAN			PEKERJAAN	PENDIDIKAN TERAKHIR	PENGHASILAN Rp (PER BULAN)	STATUS KEPEMILIKAN RUMAH	BANTUAN YANG PERNAH DITERIMA		
				L	P		RT	RW	JUM LAH	NAMA ANGGOTA KELUARGA	JENIS KELAMIN						USIA	HUBUNGAN DGN KK
1	1		UNIK SOPHAN	L		68	01	01	1			KK	Tdk/Bim Bekerja	SD	-	Sewa	BLT	
2							01	01				P 61	Istri	Buruh	SD	200.000		
3	2		ZAENALABIDIN	L		61	01	01	2				KK	Dagang	SLTA	400.000	Sewa	Tidak Ada
4							01	01				P 53	Istri	RT	SLTA	-		
5							01	01				P 22	Anak	Tdk/Bim Bekerja	SLTA	-		
6	3		NENI	P		42	01	01	3				KK	Dagang	SD	300.000	Numpang	BLT
7							01	01				L 13	Anak	Pelajar	Masih SLTP	-		
8							01	01				P 12	Anak	Pelajar	Masih SD	-		
9							01	01				P 62	Orang Tua	Tdk/Bim Bekerja	SD	-		
10	4		TAMIM	L		70	01	01	3				KK	Jasa	SD	200.000	Milik Sendiri	BLT
11							01	01				P 58	Istri	RT	SLTP	-		
12							01	01				P 22	Anak	Buruh	SLTA	200.000		
13							01	01				L 17	Anak	Pelajar	Masih SLTA	-		
14	5		NKO SATYA GRAHA	L		33	01	01	4				KK	Buruh	SLTA	200.000	Sewa	Tidak Ada
15							01	01				P 33	Istri	RT	SLTA	-		
16							01	01				L 9	Anak	Pelajar	Masih SD	-		
17							01	01				L 8	Anak	Pelajar	Masih SD	-		
18							01	01				P 3	Anak	Tdk/Bim Bekerja	Tdk/Bim Sekolah	-		

← Peta Desa



# Musyawarah/Rembug Desa atau Kelurahan

**Mekanisme dalam PNPM**, memberi ruang kepada masyarakat, khususnya masyarakat miskin dan kaum perempuan, dalam pengambilan keputusan yang terkait dengan kebutuhan dan kepentingan masyarakat umum. Forum tertinggi dalam pengambil keputusan dalam mekanisme PNPM, yang terkait dengan aspek penyusunan skala prioritas kebutuhan, pembentukan kelompok, penetapan warga/kelompok penerima manfaat, pelaksanaan dan pertanggung jawaban penyelesaian kegiatan

Difasilitasi oleh  
Pendamping  
dan Relawan



Pemetaan  
Sosial



Refleksi/Analisis  
Kemiskinan



Perencanaan  
Partisipatif



Persiapan  
pelaksanaan



Pelaporan  
Pertanggung  
Jawaban



Pemanfaatan  
dan  
pemeliharaan  
Aset

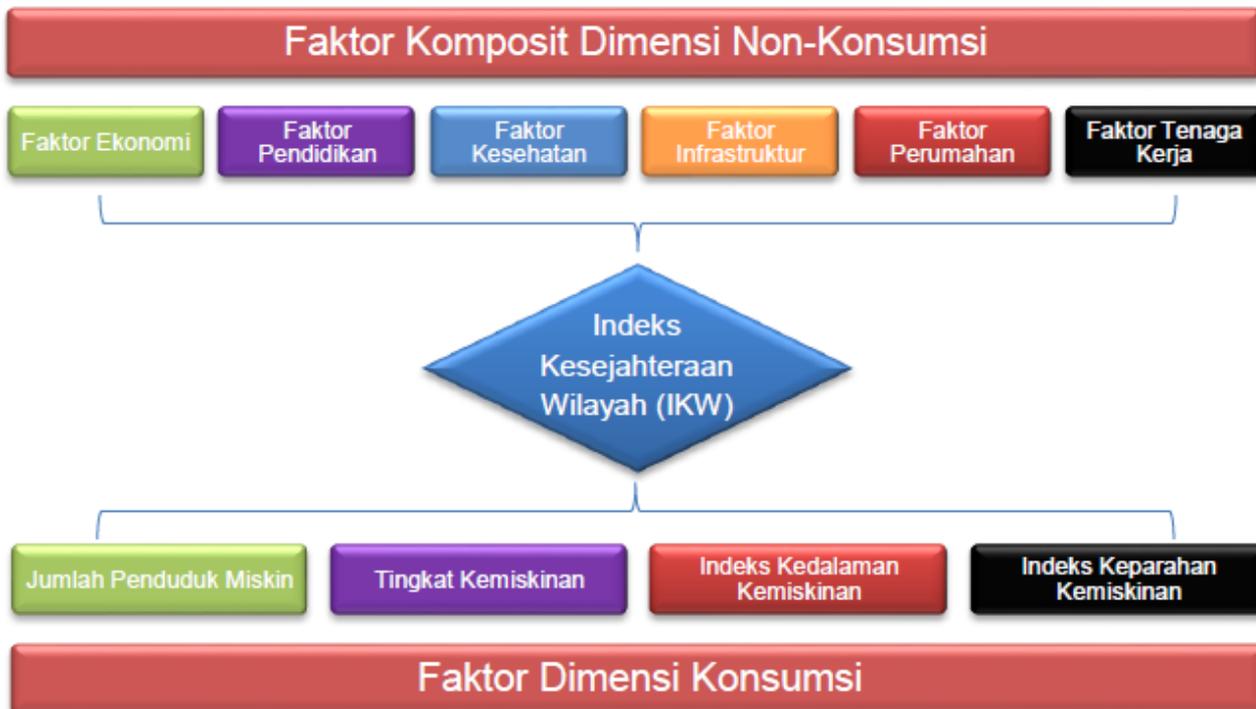


Musyawarah/  
rembug Warga

# Indeks Kesejahteraan Wilayah (IKW)

Sebuah sistim dan instrumen yang dikembangkan untuk membantu menentukan lokasi dan alokasi sasaran program yang lebih baik dan tepat sasaran (**better targeting**).

Penggunaan IKW dalam pelaksanaan program penanggulangan kemiskinan sebagai upaya menemu kenali kantung kemiskinan wilayah tidak hanya berkaitan dengan masalah kemiskinan konsumsi tetapi juga menyangkut dimensi kemiskinan lain, seperti infrastruktur, pendidikan, kesehatan, perumahan dan ketenagakerjaan;



Penggunaan IKW sebagai basis wilayah prioritas dalam skala Nasional akan **memperbaiki ketepatan pemilihan lokasi dan alokasi** sasaran program, serta menghasilkan **sebaran program** yang lebih realistis dan aktual

# Keuntungan Penggunaan Indeks Kesejahteraan Wilayah (IKW)

1. Indeks tersedia sampai ke level Desa
2. Amanah UU Desa adalah untuk mensejahterakan masyarakat dengan menjadikan desa sebagai subjek pembangunan, dan IKW mampu memotret kemiskinan desa, kec dan kab/kota secara multidimensional
3. Indeks dapat dengan mudah dipetakan dalam bentuk data diskrit sehingga memudahkan Pemda dalam melakukan perhitungan alokasi DD
4. IKW merupakan indeks komposit multidimensional yang dapat diambil secara keseluruhan atau sebagian saja (sesuai kebutuhan)
5. IKW mampu mengubah sebaran DD `menuju ketepatan sasaran yang lebih baik
6. Jika pengalokasian DD menggunakan IKW maka diharapkan dapat terjadi keselarasan pengalokasian dana ke daerah

# Pemanfaatan dan pemeliharaan Aset

Pendekatan pembangunan partisipatif yang dilaksanakan dalam program PNPM, tidak hanya dikaitkan dengan partisipatif dalam perencanaan atau pelaksanaan pembangunan, namun juga dijalankan melalui partisipasi masyarakat dalam menerima hasil-hasil dan manfaat dari pembelajaran pembangunan maupun hasil-hasil pelaksanaan program lainnya (pengelolaan aset hasil kegiatan PNPM).

Masyarakat difasilitasi oleh Relawan dan Pendamping untuk membentuk Kelompok Pemanfaat dan Pemelihara (KPP)

**Sosialisasi**



Pada saat awal program, sudah disosialisasikan kewajiban masyarakat untuk melakukan pemeliharaan terhadap asset/hasil kegiatan

**Perencanaan Partisipatif**



Pada saat rebug masyarakat menyusun perencanaan partisipatif juga dilaksanakan perencanaan pemanfaatan dan pemeliharaannya

**Pengorganisasian Masyarakat**



Pembentukan Kelompok Pemanfaat dan Pemelihara / KPP

- Aturan pemanfaatan / penggunaan Aturan
- Penggalian dan pengumpulan dana pemeliharaan
- Mekanisme dan Rencana kerja Pemeliharaan
- Mekanisme pelaporan

# KEBERLANJUTAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT MENUJU PELAKSANAAN UU. DESA

# PETA JALAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT

Sekretariat TNP2K bersama KEMENKOKESRA telah menterjemahkannya menjadi 5 PILAR kebijakan strategis

**KONSOLIDASI  
PROGRAM PEMBERDAYAAN**

**INTEGRASI  
PERENCANAAN PEMBANGUNAN**

## **Pilar 1**

Integrasi  
Program  
Pemberdayaan  
Masyarakat

## **Pilar 2**

Keberlanjutan  
Pendampingan

## **Pilar 3**

Penguatan  
Kelembagaan  
Masyarakat

## **Pilar 4**

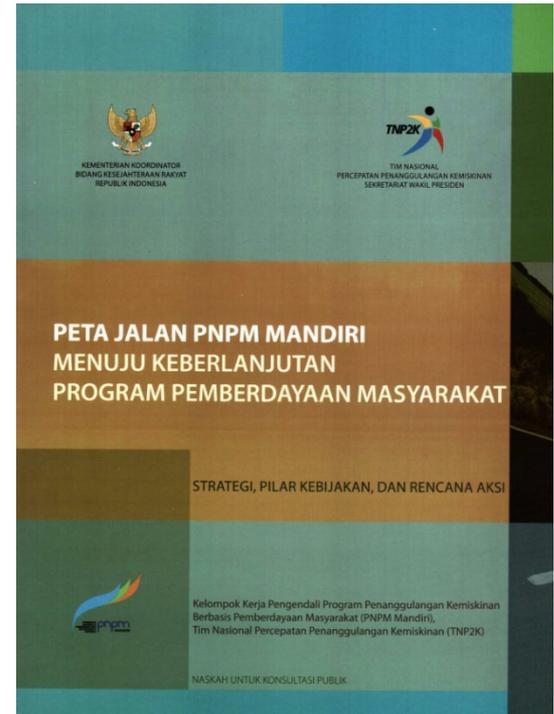
Penguatan  
Peran  
Pemerintah  
Daerah

## **Pilar 5**

Perwujudan  
Tata Kelola  
Yang Baik

# ARTI PENTING PETA JALAN PNPM

- Menjadi dasar untuk menyiapkan **Kerangka Kebijakan bagi keberlanjutan program pemberdayaan masyarakat**
- Memberi **arahan tentang prioritas dan strategi**
- Memperkuat **interaksi dan koordinasi antara Kementerian/Lembaga dan Daerah**



Secara substansi beberapa muatan pada peta jalan menjadi masukan dan telah diakomodir pada pasal-pasal UU Desa No.6/2014, khususnya terkait dengan mekanisme yang selama ini diimplementasikan dalam program PNPM, diantaranya ; perencanaan partisipatif, pendampingan, kelembagaan, pengelolaan asset dan beberapa prinsip pelaksanaan PNPM

# ISU STRATEGIS PELAKSANAAN PNPM MANDIRI DENGAN UU No.6/2014 tentang DESA

## 1. **PENYUSUNAN MEKANISME PERENCANAAN PARTISIPATIF** (Pasal 80 ayat 1 & Pasal 83 ayat 2)

Keberlanjutan Perencanaan Partisipatif PNPM Mandiri Sebagai Implementasi UU Desa, Dan Integrasi Dengan/ke Dalam Perencanaan Daerah (musrenbang).

## 2. **PENDAMPINGAN** (Pasal 112, ayat 4)

Transformasi Pola Pendampingan PNPM Mandiri Menjadi Berbasis Pemberdayaan Desa (Membangun Desa & Kawasan Pedesaan) Dan Penguatan Komunitas/Kelompok Masyarakat. Peningkatan Kompetensi Berdasarkan SKKNI, sertifikasi, sistem remunerasi yang kompetitif dan pola penganggaran.

## 3. **PETA SOSIAL DAN SISTEM INFORMASI DESA** (Pasal 86)

Pemerintah dan Pemerintah Daerah memiliki kewajiban untuk mengembangkan sistem informasi Desa dan pembangunan Kawasan Perdesaan.

# PERAN Pemerintah Daerah (TKPK) dan PNPM Mandiri mendukung pelaksanaan UU Desa

- 1. Memfasilitasi review pemetaan sosial** dan pembaharuan data peta sosial Desa serta memaksimalkan penggunaannya sebagai salah satu alat penyusunan dokumen rencana desa secara partisipatif untuk meningkatkan kualitas dan menyempurnakan RPJM-Desa (*one village one plan*).
- 2. Memfasilitasi penggunaan Indeks Kesejahteraan Wilayah (IKW)** sebagai dasar penganggaran dan penentuan besaran dana alokasi desa (DD/BLM) dengan mempertimbangkan semua aspek UU Desa, termasuk dalam pelaksanaan program-program penanggulangan kemiskinan yang di laksanakan oleh Daerah

# PERAN Pemerintah Daerah (TKPK) dan PNPM Mandiri mendukung pelaksanaan UU Desa

- 3. Memfasilitasi sinkronisasi penyusunan rencana desa** (RPJM desa/RKP desa) dengan perencanaan pembangunan daerah melalui musyawarah desa yang di dampingi oleh fasilitator/Pendamping.
- 4. Memanfaatkan tenaga Fasilitator/pendamping** dan kader/relawan dalam penguatan kapasitas masyarakat, perangkat desa dan kelembagaan lokal, memfasilitasi penyelenggaraan pemerintah Desa dan tatakelola pembangunan.
- 5. Melakukan pemantauan pelaksanaan program PNPM** dengan menggunakan 8 (delapan) ciri-ciri dasar, 4 (empat) indikator manfaat (outcome) dan dampak serta 19 (sembilan belas) indikator hasil (output) untuk mengukur keberhasilan program pada tahun 2014, sebagaimana surat menkokesra no. B.2131/KMK/D.VII/XI/2013.
- 6. Melakukan pemantauan proses siklus pemberdayaan** dengan menggunakan instrumen indeks pemberdayaan masyarakat (CEPIx / Community Empowerment Performance Index) .



Terima  
Kasih



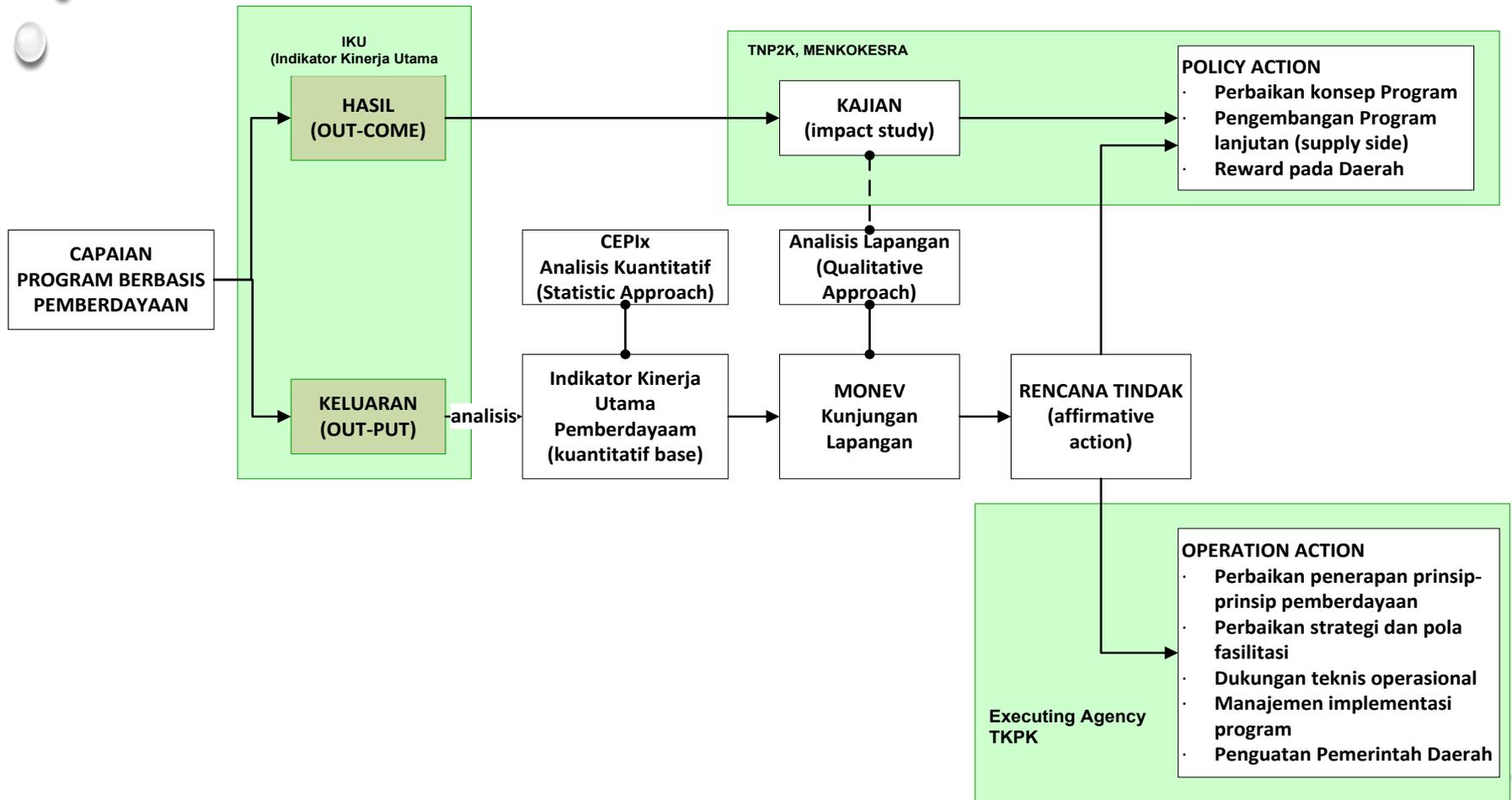
# LAMPIRAN:

# Kriteria/ Ciri-ciri Program Pemberdayaan Masyarakat (PNPM)

## Ada 8 ciri-ciri dasar PNPM yang harus dipenuhi:

1. Ada alokasi anggaran untuk mendanai perencanaan dan pelaksanaan kegiatan skala desa/kelurahan masyarakat yang dicairkan langsung dari rekening pemerintah ke rekening organisasi/lembaga (berbasis) kemasyarakatan.
2. Ada pendampingan dan pengawasan secara menerus dari program
3. Ada tindakan untuk memperkuat pemihakan kepada kepentingan kaum perempuan dan kaum yang terpinggirkan
4. Mendorong dan memperkuat peran dan fungsi organisasi masyarakat
5. Pengambilan keputusan atas pendanaan kegiatan-kegiatan melalui musyawarah masyarakat atau musyawarah wakil-wakil masyarakat
6. Masyarakat memilih & mengevaluasi pengelola kegiatan dan dana secara demokratis.
7. Pelaksanaan kegiatan secara **swakelola** oleh organisasi/ kelompok masyarakat.
8. Melaksanakan Transparansi dan Akuntabilitas penuh

# PENGGUNAAN CEPIX



# SIKLUS PEMBERDAYAAN Penyusunan PERFORMA INDEKS

FLOW AKTIFITAS (Tahapan Proses)	KOMPONEN				INDEKS FLOW
	MEETING (Juml. Pertemuan)	PARTICIPANT (Jumlah Peserta per Pertemuan)	%WOMEN PARTIC. (Partisipasi Perempuan)	%POOR PARTIC (Partisipasi Warga Miskin)	
1. Sosialisasi awal dan Musyawarah Masyarakat	M1	P1	WP1	PP1	<i>Indeks Flow 1</i>
2. Mengenal Kemiskinan	M2	P2	WP2	PP2	<i>Indeks Flow 2</i>
3. Pemetaan Swadaya	M3	P3	WP3	PP3	<i>Indeks Flow 3</i>
4. Pengorganisasian Masyarakat	M4	P4	WP4	PP4	<i>Indeks Flow 4</i>
5. Penyusunan Rencana	M5	P5	WP5	PP5	<i>Indeks Flow 5</i>
6. Pelaksanaan Kegiatan	M6	P6	WP6	PP6	<i>Indeks Flow 6</i>
<b>INDEX KOMPONEN</b>	<i>" sbg denominator P"</i>	<b>P</b>	<b>WP</b>	<b>PP</b>	